

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, KOMPETENSI AKUNTANSI, MORALITAS APARATUR, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* LAPORAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Alvina Dwi Lestary**

**NPM : 4320600038**

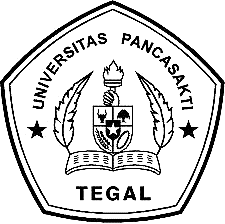
Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, KOMPETENSI AKUNTANSI, MORALITAS APARATUR, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* LAPORAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)**

# HALAMAN JUDUL

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Alvina Dwi Lestary**

**NPM : 4320600038**

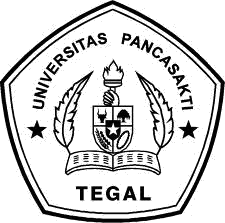
Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, KOMPETENSI AKUNTANSI, MORALITAS APARATUR, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* LAPORAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Oleh:

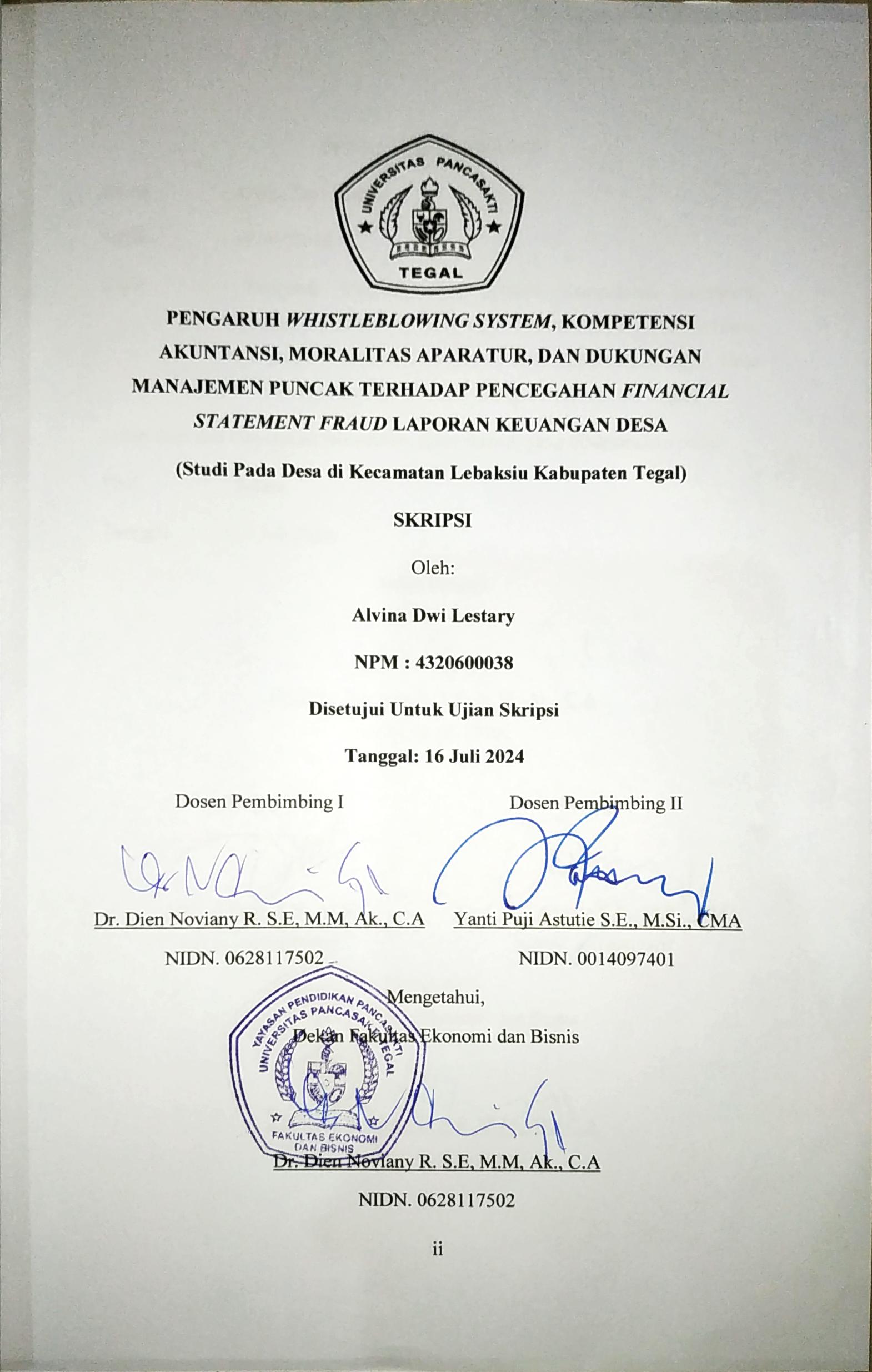
**Alvina Dwi Lestary**

**NPM : 4320600038**

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

**Tanggal: 16 Juli 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dosen Pembimbing I | | Dosen Pembimbing II |
|  | |  |
|  | |  |
| Dr. Dien Noviany R. S.E, M.M, Ak., C.A | | Yanti Puji Astutie S.E., M.Si., CMA |
| NIDN. 0628117502 | | NIDN. 0014097401 |
| Mengetahui, | |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
|  | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| Dr. Dien Noviany R. S.E, M.M, Ak., C.A | |
| NIDN. 0628117502 | |

****

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Alvina Dwi Lestary

NPM : 4320600038

Judul : Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juli 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Penguji | |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PROPOSAL | |
|  | |
| Dr. Dien Noviany R. S.E, M.M, Ak., C.A | |
| NIDN. 0628117502 | |
| Penguji I | | Penguji II |
|  | |  |
|  | |  |
| Aminul Fajri, S.E., M.Si | | Yanti Puji Astutie S.E., M.Si., CMA |
| NIDN. 0602037002 | | NIDN. 0014097401 |
| Mengetahui, | |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
|  | |
|  | |
| Dr. Dien Noviany R. S.E, M.M, Ak., C.A | |
| NIDN. 0628117502 | |

# **C:\Users\A S U S\Downloads\2024_08_16 11.21 Office Lens (2).jpg**

# **MOTTO**

“Mungkin saya membuat kesalahan kemarin, tapi saya yang kemarin tetaplah saya. Hari ini saya tetaplah saya dengan segala kesalahan dan keburukan saya. Besok saya mungkin menjadi sedikit lebih bijaksana dan itu adalah saya juga. Kesalahan dan keburukan ini adalah saya yang menciptakan bintang-bintang yang paling terang. Saya telah mencintai diri saya sendiri, untuk saya sekarang, untuk saya dimasa lalu dan untuk saya dimasa yang akan datang”

(Kim Namjoon – BTS)

**PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Hopur dan ibu Siti Nurayati, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun mereka mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Kepada nenek tersayang, Ibu Sariah, terimakasih telah ikut andil mengurus saya dari bangku sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Beliau selalu memberikan dukungan dan doanya hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Kakak tercinta, Alfiana Nur Arafik dan Khaerunnisa. Serta adik tercinta, Firotun Nisa, terimakasih atas segala doa, dukungan dan cinta yang telah kalian berikan kepada saya selama ini. Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan. Sela Gita Rengganis, M. Iqbal Misbahudin, dan Serly Azhar Kamalin, yang selalu mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan untuk diri sendiri.

# **PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvina Dwi Lestary

NPM : 4320600038

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Auditing

Menyatakan bahwa skripsiyang berjudul:

**“Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”**

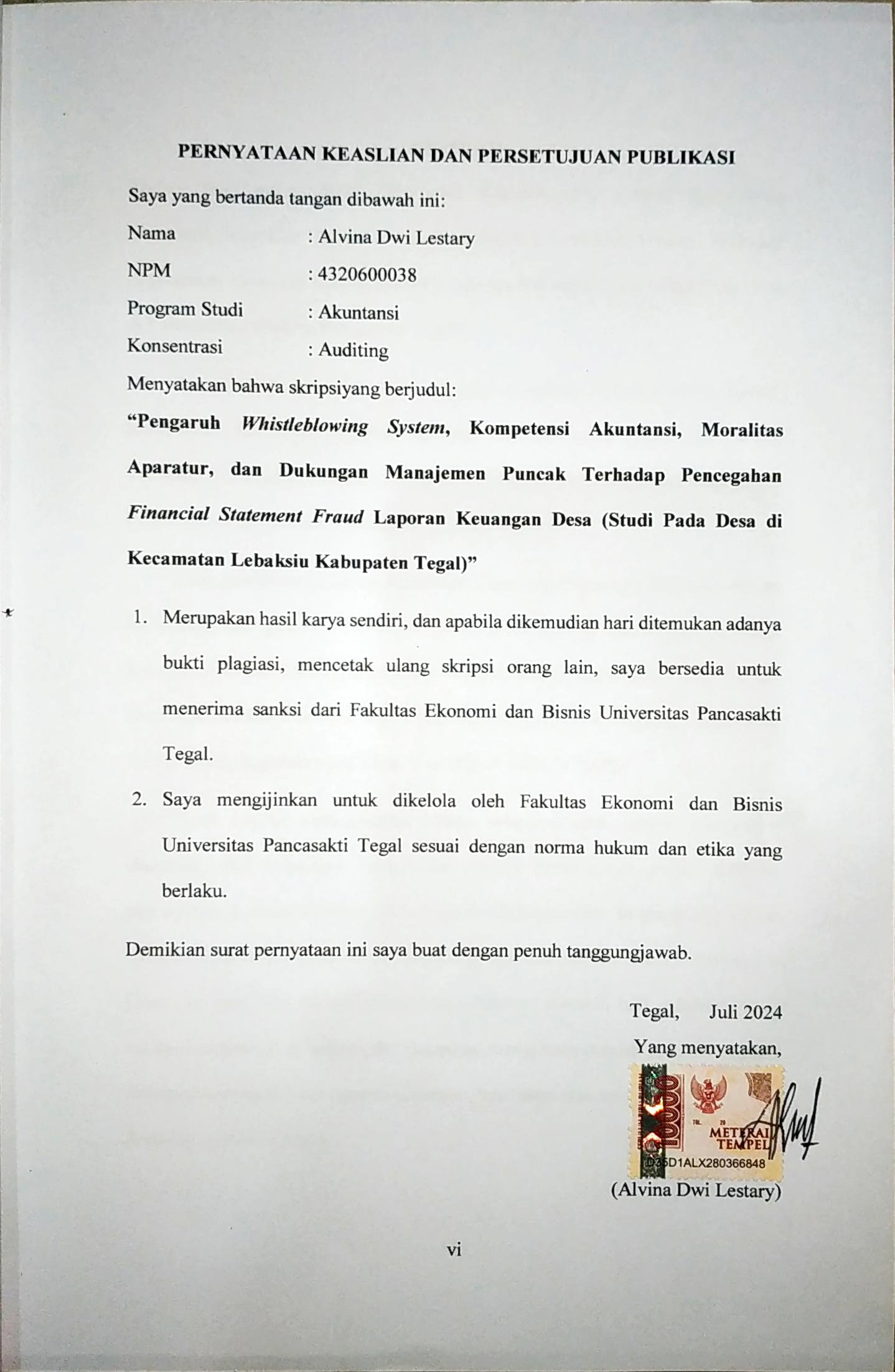
1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, mencetak ulang skripsi orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juli 2024

Yang menyatakan,

(Alvina Dwi Lestary)



# **ABSTRAK**

Alvina Dwi Lestary, 2024. “Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi sebanyak 15 Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel diambil bedasarkan sampel jenuh. Dari data tersebut diperoleh 150 responden dari perangkat desa dan masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *whistleblowing system*, kompetensi akuntansi, dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa. Sedangkan moralitas aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik *whistleblowing system*, kompetensi akuntansi, dan dukungan manajemen puncak pada pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa maka akan tinggi juga pencegahan *financial statement fraud.*

**Kata kunci: *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, Dukungan Manajemen Puncak, Pencegahan *Financial Statement Fraud,* Laporan Keuangan Desa.**

# ***ABSTRACT***

**Alvina Dwi Lestary, 2024.** *The Influence of the Whistleblowing System, Accounting Competence, Apparatus Morality, and Top Management Support on the Prevention of Financial Statement Fraud in Village Financial Reports (Study in Villages in Lebaksiu District, Tegal Regency).*

This *research aims to examine the influence of the Whistleblowing System, Accounting Competency, Apparatus Morality, and Top Management Support on the Prevention of Financial Statement Fraud in Village Financial Reports (Village Study in Lebaksiu District, Tegal Regency).*

*This type of research is quantitative. The data used in this research is primary data. The population is 15 villages in Lebaksiu District, Tegal Regency. The sampling technique was taken based on saturated samples. From this data, 150 respondents were obtained from village and community officials. The analysis used is multiple linear regression analysis.*

*The results of the analysis show that the whistleblowing system, accounting competence, and top management support have a positive effect on preventing financial statement fraud in village financial reports. Meanwhile, the morality of the apparatus has no effect on preventing financial statement fraud in village financial reports. This indicates that the better the whistleblowing system, accounting competence, and top management support in preventing financial statement fraud in village financial reports, the higher the prevention of financial statement fraud.*

***Keywords: Whistleblowing System, Accounting Competency, Official Morality, Top Management Support, Prevention of Financial Statement Fraud, Village Financial Reports.***

# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa”.

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi

kepada peneliti.

1. Yanti Puji Astutie S.E., M.Si., CMA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Januari 2024

Alvina Dwi Lestary

# **DAFTAR ISI**

[**HALAMAN JUDUL** i](#_Toc170858362)

[**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING** ii](#_Toc170858363)

[**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI** iii](#_Toc170858364)

[**MOTTO** iv](#_Toc170858365)

[**PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI** vi](#_Toc170858366)

[**ABSTRAK** vii](#_Toc170858367)

[***ABSTRACT*** ix](#_Toc170858368)

[**KATA PENGANTAR** xi](#_Toc170858369)

[**DAFTAR ISI** xiii](#_Toc170858370)

[**DAFTAR TABEL** xvii](#_Toc170858371)

[**DAFTAR GAMBAR** xviii](#_Toc170858372)

[**DAFTAR LAMPIRAN** xix](#_Toc170858373)

[**BAB I**](#_Toc170858374)[**PENDAHULUAN** 1](#_Toc170858375)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc170858376)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc170858377)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc170858378)

[D. Manfaat Penelitian 7](#_Toc170858379)

[**BAB II**](#_Toc170858380) [**TINJAUAN PUSTAKA** 9](#_Toc170858381)

[A. Landasan Teori 9](#_Toc170858382)

[1. Teori *Fraud Triangle* 9](#_Toc170858383)

[2. Teori *Stewardship* 11](#_Toc170858384)

[3. Laporan Keuangan Desa 13](#_Toc170858385)

[4. *Financial Statement Fraud* 14](#_Toc170858386)

[5. *Whistleblowing System* 22](#_Toc170858387)

[6. Kompetensi Akuntansi 27](#_Toc170858388)

[7. Moralitas Aparatur 31](#_Toc170858389)

[8. Dukungan Manajemen Puncak 34](#_Toc170858390)

[B. Penelitian Terdahulu 38](#_Toc170858391)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 48](#_Toc170858392)

[D. Hipotesis 55](#_Toc170858393)

[**BAB III**](#_Toc170858394)[**METODE PENELITIAN** 57](#_Toc170858395)

[A. Jenis Penelitian 57](#_Toc170858396)

[B. Populasi dan Sampel 57](#_Toc170858397)

[C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 60](#_Toc170858398)

[1. Definisi Konseptual 60](#_Toc170858399)

[a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 60](#_Toc170858400)

[b. Variabel Independen (Variabel Bebas) 61](#_Toc170858401)

[2. Operasional Variabel Penelitian 62](#_Toc170858402)

[D. Metode Pengumpulan Data 64](#_Toc170858403)

[1. Jenis dan Sumber Data 64](#_Toc170858404)

[2. Teknik Pengumpulan Data 64](#_Toc170858405)

[E. Uji Kualitas Data 66](#_Toc170858406)

[1. Uji Validitas 66](#_Toc170858407)

[2. Uji Reliabilitas 67](#_Toc170858408)

[F. Metode Analisis Data 67](#_Toc170858409)

[1. Statistik Deskriptif 67](#_Toc170858410)

[2. Uji Asumsi Klasik 68](#_Toc170858411)

[a. Uji Normalitas 68](#_Toc170858412)

[b. Uji Multikolonieritas 68](#_Toc170858413)

[c. Uji Heteroskedastisitas 69](#_Toc170858414)

[3. Analisis Regresi Linier Berganda 69](#_Toc170858415)

[4. Uji Hipotesis 70](#_Toc170858416)

[a. Uji Simultan (Uji Statistik f) 70](#_Toc170858417)

[b. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 71](#_Toc170858418)

[c. Koefisiensi Determinasi 71](#_Toc170858419)

[**BAB IV**](#_Toc170858420)[**HASIL DAN PEMBAHASAN** 73](#_Toc170858421)

[A. Gambaran Umum 73](#_Toc170858422)

[1. Kondisi Geografis 73](#_Toc170858423)

[B. Hasil Penelitian 75](#_Toc170858424)

[1. Deskripsi Data 75](#_Toc170858425)

[2. Identitas Responden 76](#_Toc170858426)

[C. Analisis Data dan Pengujian Data 78](#_Toc170858427)

[1. Uji Kualitas Data 78](#_Toc170858428)

[a. Uji Validitas 78](#_Toc170858429)

[b. Uji Reliabilitas 81](#_Toc170858430)

[2. Statistik Deskriptif 82](#_Toc170858431)

[3. Uji Asumsi Klasik 88](#_Toc170858432)

[a. Uji Normalitas 88](#_Toc170858433)

[b. Uji Multikolonieritas 91](#_Toc170858434)

[c. Uji Heteroskedastisitas 93](#_Toc170858435)

[4. Analisis Regresi Linier Berganda 94](#_Toc170858436)

[5. Uji Hipotesis 97](#_Toc170858437)

[a. Uji Simultan (Uji Statistik f) 97](#_Toc170858438)

[b. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 98](#_Toc170858439)

[c. Koefisiensi Determinasi 102](#_Toc170858440)

[D. Pembahasan 103](#_Toc170858441)

[**BAB V**](#_Toc170858442)[**KESIMPULAN DAN SARAN** 114](#_Toc170858443)

[A. Kesimpulan 114](#_Toc170858444)

[B. Saran 114](#_Toc170858445)

[**DAFTAR PUSTAKA** 116](#_Toc170858446)

[**LAMPIRAN** 124](#_Toc170858447)

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 45](#_Toc170589479)

[Tabel 3. 1 Populasi Sampel 57](#_Toc170589447)

[Tabel 3. 2 Sampel Penelitian 59](#_Toc170589448)

[Tabel 3. 3 Operasional Variabel Penelitian 62](#_Toc170589449)

[Tabel 3. 4 Penilaian Skala Likert 66](#_Toc170589450)

[Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Lebaksiu 74](#_Toc170589455)

[Tabel 4. 2 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 76](#_Toc170589456)

[Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 76](#_Toc170589457)

[Tabel 4. 4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 77](#_Toc170589458)

[Tabel 4. 5 Identitas Responden Berdasarkan Usia 78](#_Toc170589459)

[Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pencegahan *Financial Statement Fraud* (Y) 79](#_Toc170589460)

[Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas *Whistleblowing System* (X1) 79](#_Toc170589461)

[Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kompetensi Akuntansi (X2) 80](#_Toc170589462)

[Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Moralitas Aparatur (X3) 80](#_Toc170589463)

[Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Dukungan Manajemen Puncak (X4) 81](#_Toc170589464)

[Tabel 4. 11 Hasil Uji Reabilitas 82](#_Toc170589465)

[Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Pencegahan *Financial Statement Fraud* (Y) 83](#_Toc170589466)

[Tabel 4. 13 Deskripsi Variabel *Whistleblowing System (X1)* 83](#_Toc170589467)

[Tabel 4. 14 Deskripsi Variabel Kompetensi Akuntansi (X2) 84](#_Toc170589468)

[Tabel 4. 15 Deskripsi Variabel Moralitas Aparatur (X3) 84](#_Toc170589469)

[Tabel 4. 16 Deskripsi Variabel Dukungan Manajemen Puncak (X4) 85](#_Toc170589470)

[Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik Deskriptif 86](#_Toc170589471)

[Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas 88](#_Toc170589472)

[Tabel 4. 19 Hasil Uji Normalitas 89](#_Toc170589473)

[Tabel 4. 20 Hasil Uji Multikolonieritas 92](#_Toc170589474)

[Tabel 4. 21 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 95](#_Toc170589475)

[Tabel 4. 22 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik f) 98](#_Toc170589476)

[Tabel 4. 23 Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 99](#_Toc170589477)

[Tabel 4. 24 Hasil Uji Koefisien Determinasi 102](#_Toc170589478)

# **DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 2. 1 Teori *Fraud Triangle* 9](#_Toc170591493)

G[ambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 55](#_Toc170591494)

[Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Lebaksiu 75](#_Toc170591563)

[Gambar 4. 2 Grafik Histogram 90](#_Toc170591564)

[Gambar 4. 3 Grafik Normal Plot 91](#_Toc170591565)

[Gambar 4. 4 Grafik Scatterplot 94](#_Toc170591566)

# **DAFTAR LAMPIRAN**

[Lampiran 1 Permohonan Pengisian Kuesioner 124](#_Toc172233412)

[Lampiran 2 Kuesioner Penelitian 125](#_Toc172233413)

[Lampiran 3 Daftar Pernyataan 126](#_Toc172233414)

[Lampiran 4 Data Hasil Kuesioner Variabel Y 132](#_Toc172233415)

[Lampiran 5 Data Hasil Kuesioner Variabel X1 136](#_Toc172233416)

[Lampiran 6 Data Hasil Kuesioner Variabel X2 140](#_Toc172233417)

[Lampiran 7 Data Hasil Kuesioner Variabel X3 144](#_Toc172233418)

[Lampiran 8 Data Hasil Kuesioner Variabel X4 148](#_Toc172233419)

[Lampiran 9 Hasil Uji Validitas 152](#_Toc172233420)

[Lampiran 10 Hasil Uji Reabilitas 157](#_Toc172233421)

[Lampiran 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif 158](#_Toc172233422)

[Lampiran 12 Hasil Uji Asumsi Klasik 159](#_Toc172233423)

[Lampiran 13 Hasil Uji Analisis Linier Berganda 162](#_Toc172233424)

[Lampiran 14 Hasil Uji Hipotesis 163](#_Toc172233425)

[Lampiran 15 Bukti Penyebaran Kuesioner 165](#_Toc172233426)

[Lampiran 16 Tampilan *website Whistleblowing System* di Desa Lebakgowah 166](#_Toc172233427)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Pemerintah pusat mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat yang sah dalam suatu wilayah kabupaten, dimana rumah tangga mengelola desa tersebut sesuai dengan adat istiadat dan hak adatnya. Desa merupakan badan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam pembangunan desa, maka inisiatif yang dilaksanakan desa dapat memberikan dampak positif langsung terhadap kemampuan masyarakat untuk sejahtera secara ekonomi (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, untuk menyalurkan dana yang disahkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa bertujuan untuk mendukung masyarakat dengan mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan perekonomian desa, menanggulangi kesenjangan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan pemerintah di Indonesia (Suandewi, 2021). Dana desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dari APBN yang khusus diperuntukkan bagi Desa. Dana desa digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara bersama-sama. Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa mengkoordinasikan PPKD, dan Kepala Keuangan Desa menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan perbendaharaan. Penyediaan dana desa dalam skala besar yang dilakukan pemerintah mempunyai risiko yang cukup besar dan tidak menjamin kemungkinan terjadinya Kecurangan oleh pihak tertentu (Aprilia & Yuniasih, 2021).

1

Kecurangan *(fraud)* merupakan penyajian yang keliru atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan, serta salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pelaporan keuangan dan timbul kesalahan penanganan aset (disebut penyalahgunaan atau penggelapan) yang terkait dengan pencurian aset suatu entitas dan penyajian laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan (Rahmatika, 2016). Pemantauan dan evaluasi terhadap operasional keuangan desa diperlukan untuk menghentikan terjadinya kecurangan, dan juga diperlukan upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan *(fraud)* mengacu pada setiap upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi peluang, menghentikan, dan mengevaluasi setiap aktivitas yang meningkatkan kemungkinan berkembangnya kecurangan *(fraud)* (Suandewi, 2021).

Salah satu cara untuk mengurangi kecurangan adalah dengan menerapkan *whistleblowing system.* Penerapan *whistleblowing system* yang baik oleh karyawan sangat penting untuk mencegah kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan sistem pengaduan terhadap dugaan penipuan tertentu yang telah atau akan terjadi yang melibatkan orang lain dan dilakukan oleh organisasi tempat pelapor bekerja, dan pelapor tidak terlibat dalam penipuan yang dilaporkannya (Akhyaar et al., 2022).

Kompetensi akuntansi yang memadai diperlukan karena aparat desa masih dianggap memiliki kompetensi yang sangat rendah dalam mengelola dana desa. Keterampilan akuntansi yang tidak memadai akan menyebabkan laporan keuangan di bawah standar, sehingga mengganggu kelancaran dalam mengambil keputusan (Kurniawan et al., 2020).

Pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan adanya tingkat moralitas yang baik. Sedangkan seseorang dapat dikatakan bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Moralitas individu akan memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi (Yulianto, 2020).

Perangkat desa didorong untuk menyelesaikan tugas dan proyeknya serta menjunjung tinggi lingkungan kinerja yang positif oleh manajemen puncak. Kinerja karyawan ditingkatkan oleh kemampuan manajemen puncak, yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan kemampuan (Basri et al., 2023).

*Financial statement fraud* istilah yang digunakan untuk menggambarkan penipuan yang dilakukan manajemen yang mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat secara material sehingga merugikan kreditor dan investor. Penipuan laporan keuangan dapat berupa *financial* atau *non-financial* (Yulieth & Rafael, 2020).

Pada tahun 2022 terdapat dugaan kasus penyalahgunaan dana desa, tepatnya di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah (Redaksi, 2022). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tegal, yang telah melakukan monitoring dan evaluasi pada November 2023 ditemukan bahwa pencairan dana desa tahap dua (2) tidak melalui mekanisme atau proses rekomendasi camat dan tanda tangan bendahara desa serta kehadiran bendahara desa di Bank Jateng, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah melewati satu (1) bulan, kegiatan rehab madrasah yang belum dilaksanakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dilunasi, inventaris desa (sepeda motor) yang tidak diketahui keberadaannya, dan kegiatan pembangunan yang masih belum tercapai tetapi dana sudah dicairkan, seperti pembangunan paving blok, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), dan pembangunan jembatan.

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan desa. Dengan berfungsinya *whistleblowing system,* kompetensi akuntansi, moralitas aparatur, dan dukungan manajemen puncak dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan desa.

Mengingat tanggung jawab pemerintah desa dalam mengawasi keuangan desa adalah memberikan pelaporan keuangan yang transparan sebagai sarana melayani masyarakat desa. Seluruh desa di Kecamatan Lebaksiu memberikan informasi pengelolaan keuangan secara transparan melalui cetakan spanduk yang dipasang di depan setiap kantor balai desa yang ada di Kecamatan Lebaksiu dan masyarakat desa dapat mengawasi proses pengelolaan keuangan dan menghasilkan pengelolaan yang bertanggung jawab secara finansial. Secara khusus, mengumpulkan dan menilai bukti dari informasi oleh pihak yang berkualifikasi dan tidak memihak untuk memastikan dan mendokumentasikan tingkat kesesuaian antara data dan kriteria yang ditetapkan (Sari, 2021).

Alasan penelitian ini mengambil objek pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa karena perangkat desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk mencapai tujuan bersama, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sektor sosial, budaya, ekonomi desa, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah desa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka kerjakan dan selain itu juga secara konsisten memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai status keuangan desa. Analisis terhadap beberapa desa menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan laporan dana desa belum sepenuhnya diterapkan karena sejumlah belanja belum dilaporkan secara lengkap.

Penelitian mengenai *fraud* laporan keuangan desa sebelumnya telah dilakukan dengan hasil yang beragam. Penelitian oleh Njonjie et al (2019) menyatakan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian menurut Akhyaar et al (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian menurut Kurniawan et al (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa dan kompetensi akuntansi tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa. Dan penelitian menurut Aprilia & Yuniasih (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan budaya organisasi dan *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dibuat dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Akuntansi, Moralitas Aparatur, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah berikut:

1. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa?
2. Apakah kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa?
3. Apakah moralitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa?
4. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi akuntansi terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa.

## **Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**
2. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh *whistleblowing system,* kompetensi akuntansi, moralitas aparatur, dan dukungan manajemen puncak terhadap penceghan *financial statement fraud* laporan keuangan desa*.*
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan literatur dalam membangun, mengembangkan, dan memperbaiki desa di Kecamatan Lebaksiu guna mewujudkan desa yang baik.
4. **Manfaat Praktis**
5. Dapat digunakan sebagai masukan bagi kepala desa dan aparatur desa di Kecamatan Lebaksiu dalam pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerjanya*.*
6. Sebagai bahan evaluasi bagi para kepala desa dan aparatur desa sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Landasan Teori**

### **Teori *Fraud Triangle***

Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey tahun 1953, yang menyatakan bahwa tekanan *(preassure)*, kesempatan *(opportunity)*, dan rasionalisasi *(rationalization)* merupakan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau penipuan. Berikut ilustrasi teori *fraud triangle*:

*Fraud Triangle*

*Preassure* *Opportunity*

*Rationalization*

**Gambar 2. 1**

**Teori Fraud Triangle**

Tekanan *(preassure)* merupakan salah satu hal yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat mengakibatkan kecurangan, diantaranya:

1. Tekanan emosional yang didasari dengan keserakahan ketika seorang karyawan merasa bahwa gajinya tidak cukup dan mereka dapat melakukan kejahatan.
2. Tekanan eksternal yang mengganggu rasa aman seseorang atau menimbulkan rasa takut. Misalnya saja, tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan kesulitan keuangan, yang pada gilirannya memotivasi pejabat pemerintah desa untuk melakukan penipuan.
3. Tekanan manajemen untuk menyajikan laporan dengan baik. Misalnya, aparatur pemerintah diwajibkan atasannya untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa, Namun tekanan semacam ini dapat mendorong pejabat pemerintah desa untuk melakukan penipuan dengan memalsukan laporan keuangan, yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak sesuai.

Kesempatan *(opportunity)* merupakan keadaan eksternal dan organisasi yang mendorong terjadinya kecurangan. Alasan paling umum terjadinya tindakan penipuan yang disebabkan oleh kesempatan ini adalah pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kesenjangan dalam pengendalian internal organisasi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan aturan dan etika yang diterapkan dalam suatu organisasi, sehingga memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kecurangan (Chusanudin & Ramadhan, 2022).

Rasionalisasi *(rationalization)* merupakan cara berpikir atau keberadaan yang memungkinkan seseorang untuk membenarkan tindakan tidak jujur ​​yang telah dilakukannya. Misalnya, ketika ada kebutuhan yang mendesak, seorang pejabat akan meminjam uang dari organisasi sesuai kebutuhan dan mengembalikannya nanti. Selain itu, pejabat tersebut menggunakan uang yang bukan haknya untuk memuaskan diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan tersebut terlihat biasa dan wajar di mata masyarakat (Chusanudin & Ramadhan, 2022). Mendeteksi rasionalisasi sulit dilakukan karena keyakinan pelaku tidak dapat dipahami. Pelaku cenderung berpikir bahwa dengan mengikuti pola piker mereka, maka tindakan mereka dapat dibenarkan dan dimaafkan (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Teori *fraud triangle* diterapkan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan pentingnya organisasi atau pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Seseorang yang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap tugasnya cenderung tidak akan melakukan kecurangan. Oleh karena itu, aparat desa harus mempertanggungjawabkan dana desa dalam pengelolaannya dengan baik.

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan teori yang diperkenalkan oleh Donaldson & Davis pada tahun 1991. Menurut teori stewardship ini, situasi dimana para manager *(steward)* lebih termotivasi oleh kepentingan organisasi *(principal)* sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Secara umum, teori ini lebih cocok diterapkan pada instansi pemerintah karena tujuan utamanya adalah pelayanan masyarakat yang baik dibandingkan untuk mencari keuntungan. Dalam penelitian ini, masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, dan pemerintah desa berperan sebagai *steward* (Yesi, 2022).

Teori ini manggambarkan bagaimana mengelola organisasi atau perusahaan dengan baik. Bagaimana mengembangkan pola pikir dimana seseorang bekerja dengan kemampuan terbaiknya, namun juga harus mampu meningkatkan akuntabilitas untuk mencapai tujuan perusahaan (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Menurut teori ini, pemerintahan desa merupakan lembaga yang dapat diandalkan dan diharapkan dapat bertindak demi kepentingan umum sekaligus menjalankan tugasnya secara efektif. Teori *stewardship* diterapkan pada kebutuhan informasi dasar yang dapat mempengaruhi hubungan *principal* dan *steward*. Dalam penyusunan laporan, integritas harus diterapkan karena sering terjadi kecurangan. Sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan seluruh aspek pemerintahan daerah yang ada saat ini akan memberikan arahan dan bantuan dalam bentuk kebijakan dan prosedur agar kewajiban *steward* dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien (Yesi, 2022).

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini memperjelas peran penting pemerintah desa sebagai organisasi yang menjadi wadah aspirasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Kepala desa dan perangkat desa bertugas mengawasi pengelolaan sumber daya dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada pemerintah desa. Dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan operasional pemerintahan desa, maka akuntabilitas dapat tercapai. Ini adalah cara pemerintah desa untuk memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya dan kepatuhan hukum.

### **Laporan Keuangan Desa**

Laporan keuangan merupakan catatan seluruh aktivitas perusahaan dalam periode tertentu, dan menghasilkan informasi untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang berfungsi pagi para penggunanya (Sarmiah et al., 2022). Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Milenia et al., 2023).

Menurut Suwarno et al (2023) laporan keuangan desa adalah kumpulan informasi pada suatu organisasi dalam periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kinerja organisasi tersebut. Laporan keuangan digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan diharapkan keputusan tersebut dapat membawa pemerintah desa ke arah yang lebih baik. Dalam pelaporannya, pencatatan keuangan desa memiliki kendala yang muncul seperti penerimaan dan pengeluaran non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan desa. Aset non-kas dan kewajiban yang tidak tercatat sesuai standar akuntansi yang berlaku serta laporan operasional desa yang tidak bisa disusun secara lengkap. Keterlambatan penyusunan pelaporan keuangan desa juga sering terjadi di beberapa desa termasuk laporan pertanggung jawaban atas realisasi APBD.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Budiarti et al., 2021). Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang mempunyai nilai moneter, beserta segala barang atau uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa merupakan salah satu subsistem keuangan negara (Soleh & Rochansjah, 2015:3).

Dari semua definisi yang dibahas diatas memiliki kesamaan berupa bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berupa APBD dalam periode tertentu (Budiarti et al., 2021; Milenia et al., 2023; Sarmiah et al., 2022; Soleh & Rochansjah, 2015; Suwarno et al., 2023).

### ***Financial Statement Fraud***

1. **Pengertian *Financial Statement Fraud***

Secara umum *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2012 mendefinisikan *financial statement fraud* sebagai situasi dimana seorang pekerja atau karyawan dengan sengaja mengubah atau menghilangkan informasi penting dari laporan keuangan, misalnya dengan mengecilkan biaya atau melaporkan aset yang lebih banyak dari pada yang sebenarnya mereka miliki (Fitria, 2021).

Menurut *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99 tahun 2002 *financial statement fraud* merupakan penyajian yang salah atau penghilangan informasi yang disengaja dengan tujuan menipu pembaca laporan keuangan, hal ini biasanya dilakukan oleh manajemen di bawah tekanan atau insentif (Fitria, 2021). Menurut  *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) tahun 2002, *financial statement fraud* didefinisikan sebagai kecurangan atau perilaku yang disengaja yang menyebabkan penyajian laporan keuangan tahunan tidak akurat (Hidayat & Triyono, 2022).

Sementara, Fitria (2021) mengartikan bahwa *financial statement fraud* sebagai kesalahan signifikan atau penghilangan informasi dengan sengaja yang dimaksudkan untuk menipu pembaca informasi. Cara paling umum yang dilakukan perusahaan-perusahaan terkemuka adalah dengan secara sengaja menerbitkan informasi yang melebih-lebihkan kewajiban atau pengeluaran mereka atau menyajikan pendapatan atau aset yang lebih rendah dari yang sebenarnya.

Dari semua definisi yang dibahas diatas memiliki kesamaan berupa salah saji dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *financial statement fraud* atau kecurangan laporan keuangan diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja dan menyebabkan kesalahan informasi yang disajikan dengan tujuan tertentu yang merugikan pihak-pihak berkepentingan (Fitria, 2021; Hidayat & Triyono, 2022).

1. **Pencegahan *Financial Statement Fraud***

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi untuk menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi lasan untuk membenarkan ataurasionalisasi fraud yang dilakukan (Ramadani & Rahmatika, 2021).

Menurut *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99 tahun 2002, *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan:

1. Mengubah, memalsukan, atau memanipulasi catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung laporan keuangan yang telah disusun.
2. Melakukan penyajian yang salah atau kelalaian yang disengaja atas fakta-fakta yang penting bagi laporan keuangan.
3. Secara sengaja melakukan kecurangan mengenai prinsip-prinsip yang memiliki hubungan dengan klasifikasi, jumlah, cara penyajian, atau pengungkapan.

Dari uraian diatas, maka diperukan adanya pencegahan *financial statement fraud.* Secara umum, manajemen berupaya mencegah penipuan dengan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu menjamin bahwa kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi, dan keandalan pelaporan keuangan (Amrizal, 2019). Langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik

Tugas mengelola operasional sehari-hari di perusahaan yang sedang berkembang menjadi lebih menantang bagi karyawan. Pimpinan harus menciptakan kerangka pengendalian internal yang kuat untuk mencegah penipuan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dukungan manajemen puncak, menjamin keamanan aset perusahaan, dan menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

1. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

Evaluasi kinerja, pemrosesan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas adalah contoh aktivitas pengendalian.

1. Meningkatkan kultur organisasi

Mendorong kinerja sumber daya perusahaan agar dapat bekerja secara efisien dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling berhubungan dan dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemimpin dan masyarakat sekitar secara keseluruhan.

1. Mengefektifkan fungsi internal audit

Auditor internal harus menggunakan keterampilan posisinya dengan hati-hati karena, meskipun mereka tidak dapat menjamin bahwa penipuan tidak akan terjadi, mereka diharapkan dapat menemukan penipuan dan menawarkan rekomendasi yang berguna kepada manajemen untuk menghentikannya.

1. **Indikator Pencegahan *Financial Statement Fraud***

Menurut Ramdhani (2020), pencegahan *financial statement fraud* terdiri dari empat indikator, yaitu:

1. Analisis resiko

Analisis resiko berkaitan dengan aspek-aspek kegiatan yang menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya resiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan.

1. Implementasi

Implementasi berkaitan dengan penyediaan sarana dan tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan individu atau pejabat untuk sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

1. Sanksi

Hal ini berkaitan dengan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan karyawan atau pihak bersangkutan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik yang bersangkutan.

1. Monitoring

Monitoringberkaitan dengan pemantauan yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta melakukan evaluasi terpisah terhadap karyawan.

1. **Pengukuran Pencegahan *Financial Statement Fraud***

Menurut Budiman (2019) ada empat cara yang dapat instansi gunakan dalam melakukan pengukuran pencegahan *financial statement fraud,* antara lain:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan fraud dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankannya sehingga kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik

1. Prosedur pencegahan baku

Prosedur pencegahan baku pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi atau organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat:

1. Pengendalian intern, diantaranya adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
2. Sistem *review* dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.
3. Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis *(built in)* dalam sistem.

Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal *(deterence)* yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud.*

1. Teknik pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi. Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*, yaitu:

1. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
2. Pengawasan memadai
3. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
4. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan file *(disposal)* yang sudah tidak terpakai.
5. Kepekaan terhadap *fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai *staff* yang berpengalaman dan mempunyai ”SILA*” (Suspicious, Inquisitive, Logikal, and Analytical Mind)*, sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-kembangkan “SILA” adalah:

1. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.
2. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya.
3. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan.
4. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai.
5. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun.

### ***Whistleblowing System***

1. **Pengertian *Whistleblowing System***

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008, *whistleblowing* merupakan tindakan mengungkapkan hal yang dilakukan atau pandangan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, perilaku yang tidak pantas atau merendahkan martabat, serta sudut pandang tambahan yang mungkin membahayakan lembaga atau kelompok yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan hukum jika peraturan tersebut dilanggar. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia *(confidential)* (Islamiyah et al., 2020)*.*

*Whistleblowing System* adalah suatu sistem untuk mengungkap tindakan tidak etis yang dilakukan pelaku penipu termasuk praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada individu atau lembaga yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut (Ramadani & Rahmatika, 2021).

Penerapan *whistleblowing system* yang baik oleh karyawan sangat penting untuk mencegah kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan sistem pengaduan terhadap dugaan penipuan tertentu yang telah atau akan terjadi yang melibatkan orang lain dan dilakukan oleh organisasi tempat pelapor bekerja, dan pelapor tidak terlibat dalam penipuan yang dilaporkannya (Akhyaar et al., 2022).

Orang yang melaporkan suatu pelanggaran disebut dengan *whistleblower*. Karyawan atau individu lain yang melaporkan penipuan dalam bisnis atau organisasi pemerintah dikenal sebagai pelapor *(whistleblower),* baik pihak internal maupun eksternal yang mengetahui adanya penipuan dapat segera mengajukan pengaduan. Salah satu cara untuk mengurangi penipuan adalah dengan menerapkan *Whistleblowing system* (Islamiyah et al., 2020).

*Whistleblowing system* dapat dimaknai sebagai suatu tindakan mengekspos perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam suatu organisasi yang tidak menguntungkan para pemangku kepentingan. Adanya *whistleblowing system* memiliki tujuan mulia dalam pengungkapan kebenaran atas adanya kecurangan yang tidak menguntungkan organisasi. Pengimplementasian *whistleblowing system* berguna sebagai sarana dalam pencegahan korupsi atau tindak kecurangan yang bisa terjadi dalam proses pengelolaan keuangan di organisasi (Witari & Putra, 2023).

Dari beberapa pengertin diatas dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* merupakan suatu sistem untuk mengungkapkan suatu kecurangan yang terdapat pada perusahaan atau instansi, ataupun suatu tindakan pelaporan jika adanya kecurangan (Islamiyah et al., 2020; Akhyaar et al., 2022; Ramadani & Rahmatika, 2021; Witari & Putra, 2023).

1. **Indikator *Whistleblowing system***

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008, *whistleblowing system* mempunyai tiga aspek indikator (Budiman, 2019), yaitu:

1. Aspek struktural

Aspek struktural berisikan elemen-elemen infrastruktur yaitu:

1. Pernyataan Komitmen

Diperlukan kesediaan karyawan untuk menjadi *whistleblower* dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya kecurangan.

1. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Adanya komitmen perusahaan untuk melindungi *whistleblower* yang beriktikad baik serta taat terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku.

1. Struktur Pengelolaan *Whistleblowing system*

Organisasi sebaiknya membentuk unit pengelolaan *whistleblowing system* dengan pertanggungjawaban Komite Audit dan Direksi yang mana harus bersifat independen dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi organisasi.

1. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud ialah kecukupan kualitas dan kuantitas personil untuk menjadi petugas pengelola *whistleblowing system*. Selain itu tersedianya media komunikasi sebagai sarana pelaporan kecurangan.

1. Aspek operasional

Aspek operasional ialah aspek yang berhubungan dengan mekanisme dan standar kerja *whistleblowing system*. Perlu dibuatkan mekanisme untuk menyampaikan laporan pelanggaran yang dapat memudahkan pegawai melaporkan pelanggaran dan kemudian dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan. Petugas pelaksana unit *whistleblowing system* segera menginvestigasi dengan pengumpulan bukti tersebut.

1. Aspek perawatan

Aspek perawatan ialah suatu aspek yang meyakinkan bahwa *whistleblowing system* ini dapat berkesinambungan dan meningkat efektivitasnya. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan *(training)* kepada seluruh karyawan, termasuk para petugas unit *whistleblowing system.* Dalam pelaksanaan *whistleblowing system* perlu dipantau secara berkala efektivitasnya yang dapat dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit atau satuan pengawasan internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem memenuhi sasaran dan pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan.

1. **Pengukuran *Whistleblowing System***

Berdasarkan konsepnya, menurut Akhyaar et al (2022) *whistleblowing system* dibagi menjadi tiga pengukuran antara lain:

1. Persepsi penerapan system

Kehadiran sistem *whistleblower* mengukur seberapa baik sistem tersebut diterapkan. Hal ini juga memastikan aparatur dan masyarakat terasa nyaman dan tenteram.

1. Sistem pelaporan

Efektivitas sistem dinilai dari seberapa mudah pengaduan mengenai tindakan penipuan dapat disampaikan, dan seberapa baik pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan indikasi penyimpangan.

1. Perlindungan *whistleblower*

Efektivitas perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran *(whistleblower)* merupakan indikator utama perlindungan *whistleblower*.

### **Kompetensi Akuntansi**

1. **Pengertian Kompetensi Akuntansi**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan yang berkualitas memang penting, namun kesuksesan juga bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan peran perencanaan, implementasi, dan pengendalian internal. Kemampuan melakukan pekerjaan dengan landasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan peran jabatan yang dijabat disebut kompetensi. (Kurniawan et al., 2020).

Kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dalam proses akuntansi dikenal dengan istilah kompetensi akuntansi. Seorang akuntan yang berkompeten tinggi pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas tinggi sehingga terhindar dari penipuan. Terdapat korelasi antara kompetensi pegawai dengan kualitas laporan keuangan. Korelasi ini dapat diartikan sebagai peningkatan kompetensi yang dimiliki pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan mencegah terjadinya kecurangan (Damayanti & Eka, 2020).

Sinulingga et al (2022) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja dan penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Herlina et al., 2021). Kompetensi akuntansi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Farida et al., 2021)

Menurut Libby & Luft (1993) menjelaskan tentang empat faktor kompetensi, pengetahuan, motivasi, dan lingkungan yang menentukan kompetensi akuntansi.Kompetensi akuntansi yang dimiliki aparat desa sangat penting untuk menjamin terlaksananya tugas yang dipercayakan kepadanya. Kompetensi akuntansi yang memadai diperlukan karena aparat desa masih dianggap memiliki kompetensi yang sangat rendah dalam mengelola dana desa. Keterampilan akuntansi yang tidak memadai akan menyebabkan laporan keuangan di bawah standar, sehingga mengganggu kelancaran dalam mengambil keputusan (Kurniawan et al., 2020).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi akuntansi merupakan kemampuan seseorang dalam bidang akuntansi (Damayanti & Eka D, 2020; Farida et al., 2021; Herlina et al., 2021; Kurniawan et al., 2020; Sinulingga et al., 2022).

1. **Indikator Kompetensi Akuntansi**

Menurut Hamka et al (2023) ada dua indikator dari kompetensi akuntansi, antara lain:

1. Pemahaman ilmu akuntansi

Pemahaman akuntansi merupakan suatu usaha seseorang dalam memahami proses akuntansi dari menganalisis transaksi sampai disusunnya suatu laporan keuangan. Beberapa yang perlu diketahui untuk memahami akuntansi adalah sebagai berikut:

1. *Input* (masukan), berupa transaksi
2. Proses sistematis, terdiri dari fungsi mengindentifikasikan transaksi sampai dengan suatu penyusunan informasi keuangan.
3. *Output* (keluaran), berupa informasi keuangan seperti neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
4. Kemampuan mengelola keuangan

Laporan keuangan yang baik danakurat membutuhkan pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam pengelolaan keuangan. Kapasitas pengelolaan keuangan adalah kemampuan karyawan dalam mengelola keuangan daerah agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Pengukuran Kompetensi Akuntansi**

Kompetensi akuntansi menggunakan pengukuran Mantika & Praptiningsih (2023), antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan akuntansi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan dapat memberikan ilmu yang mempelajari pemahaman akuntansi dan kependidikan yang dapat mengajarkan kecerdasan intelektual bidang akuntansi.

1. Pengalaman

Pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. Pengalaman ini berkaitan dengan pengalaman bekerja atau berorganisasi dengan menangani bidang yang berkaitan dengan akuntansi.

1. Pelatihan

Pelatihan yang memberikan *knowledge* berbasis praktik untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam memahami analisa laporan keuangan, auditor keuangan, akuntansi biaya, penilaian *(valuasi),* dan aspek penting lainnya dalam bidang keuangan.

### **Moralitas Aparatur**

1. **Pengertian Moralitas Aparatur**

Moralitas adalah perilaku atau sikap baik atau buruk yang berasal dalam diri sendiri, lingkungan keluarga dan organisasi dapat memberikan dampak pada moralitas. Moralitas juga dapat diamati dari perkataan atau tindakan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Moralitas pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang harus dipatuhi seseorang ketika melakukan berbagai macam perilaku (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Seseorang yang berintegritas dapat berhenti melakukan kecurangan karena orang yang berintegritas biasanya mematuhi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai moral. Sedangkan, seseorang yang tidak memiliki karakter moral akan bertindak atas inisiatifnya sendiri dan mengabaikan tugas dan aturan yang harus dipatuhi. Moralitas diharapkan tertanam dalam diri seluruh perangkat desa sehingga mencegah terjadinya kecurangan (Dewi et al., 2022).

Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai keajiban mutlak. Pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan adanya tingkat moralitas yang baik. Sedangkan seseorang dapat dikatakan bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Moralitas individu akan memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini memiliki arti semakin tinggi moralitas aparatur maka aparat desa memperhatikan kepentingan yang *universal* dari pada kepentingan organisasinya maupun individunya (Yulianto, 2020).

Moralitas didefinisikan sebagai baik atau buruknya perbuatan suatu individu. Individu dapat dikatakan bermoral apabila ia bertindak sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat secara umum memiliki perilaku yang baik. Seseorang individu disebut bermoral apabila suatu individu tersebut mampu menunjukkan moralitas dalam bertindak dan berperilaku, yaitu dengan menunjukkan bahwa ia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk (Nahwa & Batara, 2023).

Moral merupakan semua norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Moralitas merupakan kemampuan penala- ran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan yang akan dilakukan etis atau tidak. Moralitas individu terdapat penalaran moral sebagai proses penentuan benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan etis (Ramadani & Noviany, 2021).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa moralitas aparatur merupakan perilaku atau sikap yang mencerminkan moral yang baik atau buruk bagi setiap aparat desa pada saat bekerja ataupun kepada masyarakat (Dewi et al., 2022; Indah & Yuniasih, 2021; Nahwa & Batara, 2023; Ramadani & Noviany, 2021; Yulianto, 2020).

1. **Indikator Moralitas Aparatur**

Menurut Apriliyani & Kholis (2023) ada beberapa indikator moralitas aparatur, yaitu:

1. Sikap dalam bekerja

Melayani masyarakat desa terutama terkait dengan kepentingan publik adalah kewajiban perangkat desa, sebagai aparat yang bertugas di desa terkadang pelayanan masyarakat tidak terbatas jam kerja saja tapi fleksibel dengan kebutuhan masyarakat. perangkat desa memiliki sikap yang baik dalam berinteraksi dengan semua orang terutama kepada masyarakat

1. Tanggungjawab perangkat desa

Tanggungjawab perangkat desa dengan melakukan semua tugas dan kewajibannya secara sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri.

1. Nilai kejujuran perangkat desa

Salah satu nilai moral yang menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu dengan benar tanpa rekayasa, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

1. Etika dalam bekerja

Etika kerja merupkan kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang tepat di tempat kerja. Ini adalah sikap yang membentuk cara seseorang melakukan tugas pekerjaannya dengan standar moral yang tinggi.

1. **Pengukuran Moralitas Aparatur**

Menurut Amalia (2023) ada tiga pengukuran moralitas aparatur, yaitu:

1. Ketepatan waktu

Aktivitas yang diselesaikan dengan awal waktu yang ditentukan sampai menghasilkan output dari kinerjanya.

1. Keterbukaan

Seseorang yang mempunyai keterbukaan dapat berbagi informasi dengan orang lain. Keterbukaan akan menghindari dari kesalahpahaman atas penilaian pribadi.

1. Kinerja aparatur desa

Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Kinerja aparatur desa merupakan proses dan hasil yang dicapai suatu program atau kebijakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelayanan publik.

### **Dukungan Manajemen Puncak**

1. **Pengertian Dukungan Manajemen Puncak**

Dukungan manajemen puncak merupakan orang yang mempunyai tingkat senior dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Manajemen puncak mendorong staf untuk menyelesaikan tugas dan proyek serta menjunjung tinggi lingkungan kerja yang positif. Kinerja karyawan ditingkatkan oleh kemampuan manajemen puncak, yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Dukungan dari manajemen puncak ditunjukkan melalui komitmen, pemecahan masalah yang kooperatif, memberikan ide, menyediakan saran, dan kerja keras infrastruktur berupa *hardware* dan *software*, serta kontribusi dan bantuan finansial dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi (Basri et al., 2023).

Dukungan manajemen puncak merupakan tingkat pertama dimana pemimpin publik mempunyai dampak terhadap kejelasan tujuan. Tujuan tim tidak dapat berhasil dilaksanakan oleh pemimpin publik yang profesional sampai mereka menerima dukungan manajemen puncak. Kejelasan tujuan memerlukan studi yang menunjukkan perilaku kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak bertugas membuat rencana, yang perlu mencakup data dan pengalaman terkait mengenai situasi umum yang muncul diperusahaan sepanjang durasi proyek (Zada et al., 2023).

Noviany Rahmatika (2020) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak dapat dilihat dalam beberapa bentuk misalnya, membantu tim dalam menangani rintangan, menunjukkan komitmen untuk pekerjaan dan mendorong bawahan.

Setiap bisnis membutuhkan dukungan dari manajemen senior untuk mencapai tujuannya dan menentukan tingkat keberhasilan yang mungkin dicapai. Bantuan manajer untuk pengguna sistem dapat berupa dukungan manajemen puncak. Dukungan dari atasan dapat berupa inspirasi atau dorongan yang berorientasi konstruktif (Hapsari & Susilowati, 2023).

Dukungan manajemen puncak merupakan perilaku eksekutif yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi. Dukungan manajemen puncak juga merupakan pemahaman manajemen senior tentang sistem komputer, serta tingkat minat, dukungan, dan pengetahuan tentang sistem informasi atau komputerisasi (Wijayanti et al., 2023).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen puncak merupakan orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan memiliki kemampuan manajerial untuk memberikan dukungan positif kepada bawahannya (Hapsari & Susilowati, 2023; Basri et al., 2023; Noviany Rahmatika, 2020; Wijayanti et al., 2023; Zada et al., 2023).

1. **Indikator Dukungan Manajemen Puncak**

Menurut Noviany Rahmatika (2020) dukungan manajemen puncak memiliki tiga indikator, sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pengembangan perangkat desa, adalah sebuah proses ketika perangkat desa mendapatkan kapabilitas untuk membantu mencapai tujuan instansi.
2. Standar kinerja perangkat desa, adalah tingkat yang diharapkan dari kinerja, dan merupakan pembanding kinerja *(benchmark)*, atau tujuan, atau target.
3. Peralatan dan teknologi setiap instansi, adalah perlengkapan yang disediakan oleh instansi untuk menunjang proses kerja.
4. **Pengukuran Dukungan Manajemen Puncak**

Menurut Renoat et al (2022) model pengukuran instrument dukungan manajemen puncak dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Keputusan yang berkualitas

Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Pengambil keputusan sepenuhnya mengerti latar belakang, tujuan dan sasaran, alternatif penyebab tindakan, serta konsekuensi- konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan.

1. Penerimaan keputusan

Penerimaan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses penerimaan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Dalam proses memutuskan tentang sesuatu yang penting dapat dilakukan baik itu individu, sekelompok orang atau dalam suatu organisasi.

1. Kepuasan dengan proses keputusan

Kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja.

1. Membangun keahlian partisipan

Memberikan dorongan melalui ketahlian yang dimilikinya kepada anggota atau karyawan lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang terkait dengan *whistleblowing system,* kompetensi akuntansi, moralitas aparatur, dukungan manajemen puncak dan *financial statement fraud*  telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al (2020) yang bertujuan untuk mengetahui pengrauh sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi terhadap penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian lapangan. Data primer merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dan penyebaran kuesioner merupakan metode pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini sampel dipilih secara *purposive* sampling dengan menggunakan metode *nonprobability* sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi secara signifikan mengurangi penyelewengan dana desa, namun kompetensi akuntansi tidak ada hubungannya atau tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa. Menurut objek penelitian yang diteliti yaitu perangkat desa di Kecamatan Bluto khususnya bagian keuangan desa, sistem akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan desa sehingga sangat penting dalam mencegah kemungkinan penyelewengan keuangan. Namun karena semua perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan sangat mungkin melakukan penyalahgunaan dana desa, maka kemampuan perangkat desa dalam berpotensi menyalahgunakan dana desa tidak menjadi acuan jika terjadi penyalahgunaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2022) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Prambanan Klaten. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penggunaan kuesioner dan metode sempel random sampling. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana praktik akuntabilitas, moralitas individu, dan kompetensi aparatur mempengaruhi pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa adalah keterampilan atau kompetensi aparatur desa. Oleh karena itu, masyarakat berupaya untuk terus meningkatkan keterampilan para pejabat melalui pengajaran dan pelatihan tentang cara menangani keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa, moralitas individu dan pencegahan penipuan saling berkaitan, yaitu individu dengan standar moral yang lebih tinggi akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan penipuan. Pemerintah desa perlu menyadari betapa pentingnya memahami dan menerapkan konsep akuntabilitas karena kekurangan dalam hal ini dapat menyebabkan masalah pencegahan penipuan. Studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memerlukan lebih dari sekedar pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, hal ini juga menunjukkan seberapa baik setiap operasi mengelola dana desa. Namun, *whistleblowing* dan budaya organisasi tidak berdampak pada penghentian penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Karena selama lima tahun terakhir tidak ditemukan adanya penyelewengan dana desa di Kecamatan Prambanan, Klaten, maka budaya organisasi baik yang berkembang di sana menjadikan pegawai terbiasa dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Karena ketatnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan dana desa, tidak ditemukan adanya kecurangan dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018. Akibatnya, *whistleblowing* tidak berdampak pada penghentian kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ayu (2021) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Mengwi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan moralitas individu secara signifikan meningkatkan pencegahan penipuan. Jika orang dengan standar moral yang tinggi mampu menghentikan penipuan karena mereka lebih mengikuti hukum sesuai dengan nilai-nilai yang diterima, maka orang dengan standar moral yang rendah lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri dari pada mengikuti hukum dan kewajibannya. Seorang pegawai akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila mempunyai rasa komitmen organisasi yang kuat. Oleh karena itu, komitmen organisasi seseorang berkorelasi langsung dengan tingkat pencegahan penipuannya.Pemerintah Kabupaten Badung telah menyediakan Badung *whistleblowing system*, aplikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk melaporkan informasi suatu tindakan yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk diterapkan di Desa Sekecamatan Mengwi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Yuniasih (2021) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Seluruh perangkat desa dari seluruh desa di Kota Denpasar menjadi populasi penelitian. Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala keuangan merupakan responden. Teknik purposive sampling digunakan dalam metode penentuan sederhananya. Moralitas individu dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan penyelewengan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Denpasar, berdasarkan hasil penelitian kompetensi aparatur desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyani (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan *survey*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Inspektorat Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pengujian hiptesis, diketahui bahwa dukungan manajemen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud.* Artinya, dengan besarnya dukungan manajemen akan memberikan dampak positif terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al (2020) yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan bersifat kuantitatif. Data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada seluruh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitan ini dilakukan pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicis di Kecamatan Wajak. Temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, moralitas, dan kompetensi aparatur desa sekaligus mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas sistem pengendalian internal, moralitas, kompetensi aparatur, dan *whistleblowing* semuanya berdampak positif dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut juga berdampak positif terhadap pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al (2022) yang bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bansari Temanggung. Penelitian ini menggunakan survei untuk melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, hasil penyebaran kuesioner sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, dan sampel penelitiannya terdiri dari BPD, kepala perencanaan, sekretaris, kepala desa, dan bendahara di 13 desa di Kecamatan Bansari Temanggung. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal tidak efektif mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, kepatuhan pelaporan keuangan dan sistem pelaporan pelanggaran mampu mencegahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Njonjie et al (2019) yang bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer. Pejabat pengelola keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara ikut serta dalam penelitian ini sebagai responden. Populasi yang digunakan adalah pengelola keuangan desa dari setiap desa di Kabupaten Halmahera Utara. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data, dan SPSS versi 22 digunakan untuk membantu pengujian data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur semuanya mempunyai dampak negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suandewi (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, moralitas dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kecamatan Payangan. Populasi penelitian ini adalah aparat desa di Kecamatan Payangan. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel penelitian yang berjumlah 59 orang perangkat desa. Pengambilan sampel *Proportionate Stratified Random Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, namun sistem pengendalian internal berpengaruh, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan, dan *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Eka (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, dan budaya organisasi terhadap penyalahgunaan dana desa pada desa di Kabupeten Sleman. Desa-desa di Kabupaten Sleman menjadi populasi penelitian. Purposive sampling merupakan metode yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel. Regresi linier berganda merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program komputer SPSS 25. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan budaya organisasi dan sistem akuntansi, kompetensi akuntansi mempengaruhi kemungkinan penyalahgunaan dana desa.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel independen moralitas aparatur dan variabel dependen *financial statement fraud.* Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner.Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek yang berlokasi di Kecamatan Lebaksiu, sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian saya menambahkan variabel independen yaitu *whistleblowing system,* kompetensi akuntansi, dan dukungan manajemen puncak.

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Sofie Noor Sofiyania (2019) | Pengaruh Dukungan Manajemen dan Kapabilitas Auditor Intern Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan kapabilitas auditor intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud.* |
| 2 | Philep Njonjie, Grace Nangoi, dan Hendrik Gamaliel (2019) | Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa. |
| 3 | Zelvi Ainun Naja, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2020) | Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa, sedangkan Kompetensi akuntansi tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa. |
| 4 | Faridatul Islamiyah (2020) | Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. |
| 5 | Alfiana Damayanti dan Rani Eka Diansari (2020) | Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, dan Budaya Organisasi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa, sedangkan sistem akuntansi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. |
| 6 | Ida Ayu Mega Evia Lestary dan Putu Cita Ayu (2021) | Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu, komitmen organisasi dan *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dengan signifikansi. |
| 7 | Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni wayan Yuniasih (2021) | Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu dan budaya organisasi berpengaruh positif dari pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa. |
| 8 | Ni Kadek Suandewi (2021) | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* Pengelolaan Dana Desa | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian intern dan moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. |
| 9 | Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, dan Retno Yulianti (2022) | Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan budaya organisasi dan *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. |
| 10 | Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, dan Wahyu Anggit Prasetya (2022) | Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. |

## **Kerangka Pemikiran Konseptual**

Menurut Suliyanto (2018:92) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran konseptual merupakan hubungan antar variabel yang telah diteliti sebelumnya dan dapat diuji ulang untuk memastikan kebenarannya salam penelitian tersebut. Kerangka pemikiran dapat dilihat berdasarkan teori dasar dan temuan sebelumnya.

1. **Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa**

Penelitian yang dilakukan Lestari & Ayu (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dengan signifikansi. Hal ini menunjukan bahwa dalam suatu organisasi, keberadaan *whistleblowing system* memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Menurut penelitian Akhyaar et al (2022) menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pencegahan *fraud* akan meningkat jika w*histleblowing system* juga berjalan secara efektif.

Penelitian menurut Maulida & Bayunitri (2021) menunjukkan bahwa Penerapan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Bank Sentral Jabar Banten di Bandung.

Penelitian menurut Islamiyah et al (2020) menunjukkan bahwa pengujian hipotesis membuktikan *whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, artinya semakin tingginya tindakan *whistleblowing* yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Suandewi (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* pengelolaan dana desa. Hal tersebut artinya bertambah tinggi *whistleblowing* maka makin meningkatkan pencegahan kecurangan *(fraud).*

Menurut penelitian Witari & Putra (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Dan penelitian menurut Adawiyah et al (2023) juga menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dari penelitian diatas, jika *whistleblowing system* semakin maksimal maka pencegahan *financial statement fraud* akan semakin baik juga.Oleh karena itu, *whistleblowing system* sangat penting untuk mendeteksi pencegahan  *financial statement fraud.* Tujuannya agar dapat mengurangi adanya kasus penipuan laporan keuangan. Dari *whistleblowing system* yang berjalan dengan baik, maka akan terciptanya pengelolaan dana desa yang baik pula.

1. **Pengaruh Kompetensi Akuntansi terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa**

Penelitian yang dilakukan Taufik & Nasir (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desanberpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa. Hal ini berarti tingkat kompetensi aparat desa yang sangat baik dalam meningkatkan pencegahan *fraud.* Dengan tingkat kompetensi yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud* sehingga aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Penelitian menurut Ryan & Purnamasari (2024) menyatakan bahwa kompetensi auditor internal memiliki pengaruh positif dan simultan terhadap pencegahan kecurangan. Artinya semakin baik kompetensi seorang auditor internal, maka semakin baik pencegahan kecurangan pada perusahaan yang dapat meminimalisir terjadinya *fraud.*

Menurut penelitian Puspita & Ratnadi (2023) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya kompetensi para aparatur desa dalam hal pengetahuan, keterampilan dan kelahlian serta sikap dalam berperilaku dapat meminimalisir *fraud* pada dana desa.

Penelitin menurut Pratama et al (2024) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kasus *fraud* atau kecurangan akuntansi. Hal ini dibuktikan karena kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan memungkinkan mereka untuk memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntansi dan standar yang berlaku, serta menguasai teknik dan metode yang diperlukan dalam pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan Rahayu et al (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas akan memahami tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mengelola keuangan serta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dari penelitian diatas, jika kompetensi akuntansi semakin maksimal maka pencegahan *financial statement fraud* akan semakin baik juga. Oleh karena itu, kompetensi akuntansi sangat berpengaruh untuk pencegahan *financial statement fraud.* Maka kompetensi dapat dibentuk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui penyelesaian program pelatihan dan pendidikan.

1. **Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa**

Penelitian menurut Yusuf et al (2021) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Hal ini menunjukan bahwa meningkatnya pencegahan *fraud* dana desa akan meningkat seiring dengan meningkatnya moralitas. Aparatur dengan moral yang baik tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Menurut penelitian Aprilia & Yuniasih (2021) menyatakan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti pencegahan *fraud* akan meningkat seiring dengan peningkatan moralitas aparatur.

Menurut penelitian Amalia (2023) meyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Individu yang menanamkan moral yang baik terhadap dirinya sendiri akan melakukan tindakan yang baik untuk organisasinya. Semakin tinggi tingkat moralitas individu maka akan semakin tinggi moralitas individu tersebut dalam mencegah kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Apriliyani & Kholis (2023) membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Grogol. Jadi moralitas individu merupakan tata tertib yang dapat mengontrol baik buruknya perbuatan seseorang, sehingga seseorang dapat memilah apakah yang sudah dilakukan itu benar atau salah, diperbolehkan atau tidak.

Penelitian menurut Yusuf et al (2021) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Dan penelitin menurut Ramadani & Noviany (2021) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Songgom.

Dari penelitian diatas, jika moralitas aparatur semakain baik maka pencegahan *financial statement fraud* akan semakin baik juga. Dalam hal ini moralitas aparatur sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya *financial statement fraud.* Karena seseorang akan bertindak jujur ​​secara moral ketika penalaran moralnya lebih kuat. Disisi lain, *fraud* lebih mungkin terjadi ketika penalaran moral seseorang lemah.

1. **Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa**

Penelitian yang dilakukan Sofiyani (2019) menunjukkan bahwa dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud.*

Menurut penelitian Sarni et al (2020) menjelaskan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan pada pemerintah daerah di Sumatra Barat.

Penelitian yang dilakukan Noviany Rahmatika (2020) menjelaskan dalam penelitiannya membuat skema mencegah mendeteksi kecuragan dalam organisasi yang terintegrasi. Dukungan manajemen puncak menjadi salah satu alat dalam mencegah, mendeteksi *employee fraud.*

Penelitian menurut Rasmadi (2021) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan dukungan pimpinan terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian menurut Hikma Ariefadisya (2019) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Bagi pegawai dukungan atasan merupakan dukungan organisasi, karena pegawai menganggap bahwa atasan mereka merupakan wakil organisasi. Semakin tinggi dukungan atasan maka akan semakin tinggi keputusan seorang pegawai untuk melaporkan kecurangan yang terjadi.

Dari penelitian diatas, jika dukungan manajemen puncak semakin maksimal maka pencegahan *financial statement fraud* akan semakin baik juga. Dalam hal ini dukungan manajemen puncak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya *financial statement fraud.* Karena adanya dukungan manajemen puncak maka atasan harus memaksimalkan pengembangan motivasi dan rmenambah rasa percaya diri bawahannya agar dapat mempersiapkan untuk bekerja lebih baik dan tidak melakukan kecurangan.

**Gambar 2. 2**

**Kerangka Pemikiran**

## **Hipotesis**

Menurut Suliyanto (2018:100) arti dari hipotesis yaitu suatu pernyataan sementara yang memerlukan lebih banyak penelitian untuk dipahami sepenuhnya. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1: *Whistleblowing System* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa

H2: Kompetensi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa

H3: Moralitas Aparatur Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa

H4: Dukungan Manajemen Puncak Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa.

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

## **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain (Suliyanto, 2018:14).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah terdapat pengaruh antar variabel secara spesifik yaitu *whistleblowing system* (X1), kompetensi akuntansi (X2), Moralitas aparatur (X3), dan dukungan manajemen puncak (X4) terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *financial statement fraud* laporan keuangan desa (Y).

## **Populasi dan Sampel**

1. **Populasi Penelitian**

Proses pertama untuk melakukan penelitian sampel adalah penentuan populasi. Penelitian ini mempunyai populasi sebanyak 15 desa, yaitu:

**Tabel 3. 1**

**Populasi Penelitian**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** |
| 1 | Desa Balaradin |
| 2 | Desa Dukuhdamu |
| 3 | Desa Dukuhlo |
| 4 | Desa Jatimulya |
| 5 | Desa Kajen |
| 6 | Desa Kambangan |
| 7 | Desa Kesuben |
| 8 | Desa Lebakgowah |
| 9 | Desa Lebaksiu Kidul |
| 10 | Desa Lebaksiu Lor |
| 11 | Desa Pendawa |
| 12 | Desa Slarang Kidul |
| 13 | Desa Tegalandong |
| 14 | Desa Timbangreja |
| 15 | Desa Yamansari |

1. **Sampel Penelitian**

Metode sampel jenuh digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini. Sampel jenuh mengacu pada strategi pengambilan sampel yang memanfaatkan setiap karakteristik populasi untuk menghasilkan temuan yang selaras dengan tujuan penelitian (Suliyanto, 2018:226). Seluruh populasi dijadikan sebagai sampel untuk penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan 2 masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Lebaksiu. Disetiap desa terdapat 8 perangkat desa terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Tata Usaha Dan Umum
4. Kepala Urusan Keuangan
5. Kepala Urusan Perencanaan
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Kesejahteraan
8. Kepala Seksi Pelayanan

Dari responden diatas, sampel penelitian dapat dibuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

**Sampel Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **Jumlah Perangkat Desa** | **Sampel** |
| 1 | Balaradin | 10 | 10 |
| 2 | Dukuhdamu | 10 | 10 |
| 3 | Dukuhlo | 10 | 10 |
| 4 | Jatimulya | 10 | 10 |
| 5 | Kajen | 10 | 10 |
| 6 | Kambangan | 10 | 10 |
| 7 | Kesuben | 10 | 10 |
| 8 | Lebakgowah | 10 | 10 |
| 9 | Lebaksiu Kidul | 10 | 10 |
| 10 | Lebaksiu Lor | 10 | 10 |
| 11 | Pendawa | 10 | 10 |
| 12 | Slarang Kidul | 10 | 10 |
| 13 | Tegalandong | 10 | 10 |
| 14 | Timbangreja | 10 | 10 |
| 15 | Yamansari | 10 | 10 |
| **Jumlah** | | **150** | **150** |

Karena keterbatasan data yang tersedia maka menurut Hair et al (2019), jumlah sampel untuk mencapai tingkat kekuatan statistik dan dianggap mewakili populasi yaitu minimal 100 responden walaupun angka tersebut relatif kecil.

Berdasarkan saran tersebut, maka dalam penelitian ini responden yang didapat ialah 150 responden dan telah memenuhi kriteria responden. Artinya, jumlah responden yang didapat telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditertentukan.

## **Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**

### **Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dicirikan sebagai gagasan sementara tentang suatu peristiwa yang memiliki makna konseptual. Karena variabel tidak dapat diukur secara konseptual, maka variabel tersebut harus diperiksa ulang secara valid (Suliyanto, 2018:147). Variabel penelitian merupakan gagasan tentang suatu peristiwa yang akan diteliti guna menghasilkan data yang dapat diambil kesimpulannya. Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Menurut Suliyanto (2018:127) variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pencegahan *Financial Statement Fraud* yang merupakan tindakan pencegahan atas kesengajaan membuat laporan keuangan yang menyajikan secara tidak benar atau memuat jumlah kesalahan pengungkapan keuangan, dengan tujuan menyesatkan untuk melaporkan keuangan pengguna (Nurrizkiana, 2017).

#### **Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Menurut Suliyanto (2018:127) variabel independen merupakan besar kecilnya nilai variabel lain yang dipengaruhi atau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel lain. Terdapat 4 (empat) variabel independen antara lain:

1. *Whistleblowing System*

*Whistleblowing system* merupakan sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan aktivitas ilegal atau aktivitas lain yang mungkin merugikan pemangku kepentingan dan organisasi (Ramdhani, 2020).

1. Kompetensi Akuntansi

Kompetensi akuntansi merupakan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki seseorang di bidang akuntansi atau manajemen keuangan (Yusuf et al., 2021)

1. Moralitas Aparatur

Moralitas aparatur merupakan sifat yang menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang. Orang yang bermoral tertarik pada perilaku yang lurus secara moral dan nilai-nilai positif. Seseorang yang tidak memiliki karakter moral akan menyakiti dan mungkin membahayakan orang lain (Widyaningsih, 2019).

1. Dukungan Manajemen Puncak

Dukungan manajemen puncak merupakan kesiapan manajemen puncak untuk menyediakan alat dan wewenang atau kekuasaan yang diperlukan untuk keberhasilan proyek (Perlita, 2019).

### **Operasional Variabel Penelitian**

**Tabel 3. 3**

**Operasional Variabel Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **No Item** | **Skala** | **Sumber** |
| Pencegahan *Financial Statement Fraud* Laporan Keuangan Desa(Y) | Analisis Resiko | Kendala bekerja | 1 | Interval | Maulida & Bayunitri (2021) |
| Pemaham lingkungan kerja | 2,3 |
| Implementasi | Meningkatkan implementasi | 4 |
| Kejujuran karyawan | 5 |
| Sanksi | Sanksi keterlibatan | 6 |
| Sanksi bagi pelaku | 7 |
| *Monitoring* | Struktur pengendalian | 8 |
| Penilaian prestasi | 9 |
| *Whistleblowing System* (X1) | Aspek Struktural | Penerapan *whistleblowing* untuk mencegah penipuan | 1 | Interval | Rizky & Ramdhani (2019) |
| Perlindungan untuk pelapor | 2 |
| Membentuk *whistleblowing* | 3 |
| Aspek Operasional | Akses bagi pelapor | 4 |
| Menjamim kerahasiaan pelapor | 5 |
| Aspek Perawatan | mekanisme pelaporan | 6 |
| Komunikasi antara petugas dengan pelapor | 7 |
| Kompetensi Akuntansi (X2) | Pemahaman Akuntansi | Pengetahuan aparat desa tentang akuntansi | 1 | Interval | Widyaningsih (2019) |
| Pengalaman tentang akuntansi | 2 |
| Kemampuan Mengelola Keuangan | Penugasan dilakukan dengan baik | 3 |
| Menyajian laporan keuangan | 4,5 |
| Moralitas Aparatur (X3) | Sikap dalam Bekerja | Sikap saat bekerja | 1 | terval | Yulianto (2020) |
| Kesadaran akan perilaku dengan masyarakat | 2 |
| Tanggungjawab Perangkat Desa | Tanggung jawab bekerja | 3 |
| Pelatihan pengembangan moral | 4 |
| Kejujjuran Perangkat Desa | Diperlukan sifat jujur dalam bekerja | 5 |
| Sikap individu | 6 |
| Etika dalam Bekerja | Pemahaman tentang moral | 7 |
| Peraturan kerja | 8 |
| Dukungan Manajemen Puncak (X4) | Pelatihan dan Pengembangan Perangkat Desa | Peningkatan keterampilan | 1 | Interval | Iskandar (2020) |
| Memberi pelatihan | 2 |
| Standar Kinerja Perangkat Desa | Perhatian manajemen puncak | 3 |
| Dukungan sumber daya | 4 |
| Peralatan dan Teknologi setiap Instansi | Peralatan yang lengkap | 5 |
| Teknologi yang memadai | 6 |
| Variabel Kontrol, yaitu variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat konstan oleh peneliti sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain selain variabel bebas yang dimungkinkan mempengaruhi hasil variabel terikat. | Jenis Kelamin | Laki-laki dan Perempuan | - | - | - |
| Umur | 18-28 tahun, 29-39 tahun, 40-50 tahun, dan >50 tahun |
| Pendidikan | SLTA/Sederajat, Diploma, S1, S2, dan S3 |

## **Metode Pengumpulan Data**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penyebaran kuesioner merupakan salah satu cara untuk memperoleh data primer mengenai indikator-indikator yang diperlukan dalam penelitian ini (Suliyanto, 2018:167).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan pembagian data dengan memberikan sejumlah rancangan pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan (Suliyanto, 2018:167). Kuesioner terdiri dari daftar pertanyaan relevan yang telah disiapkan sebelumnya, yang membahas masalah yang sedang diteliti secara terorganisir oleh peneliti. Responden akan diberikan lembar pertanyaan untuk diisi guna meminta jawaban. Peneliti menyampaikan kuesioner secara langsung atau mengirimkannya kepada setiap responden melalui email guna mengumpulkan data primer. Dalam penelitian ini kuesioner disusun dalam daftar pernyataan dan responden diminta untuk memberikan jawaban berupa tanda centang (√ ).

1. Skala Likert

Dengan menggunakan skala likert, satuan pengukuran yang digunakan dengan memberikan angka antara 1 sampai 5 untuk setiap alternatif jawaban yang ditawarkan dalam pernyataan tersebut. Untuk mengukur kelengkapan kuesioner, skala likert yang digunakan terdiri dari lima poin yaitu : sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut bobot kelima penilaian tersebut:

**Tabel 3. 4**

**Penilaian Skala Likert**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Notasi** | **Keterangan** | **Nilai** |
| 1 | SS | Sangat Setuju | 5 |
| 2 | S | Setuju | 4 |
| 3 | N | Netral | 3 |
| 4 | TS | Tidak Setuju | 2 |
| 5 | STS | Sangat Tidak Setuju | 1 |

## **Uji Kualitas Data**

Berbagai uji yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas, keakuratan, dan keandalan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas kuesioner agar menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipercaya. Jika uji validitas mampu menghasilkan kuesioner yang dapat diukur, maka pengukuran kuesioner dalam penelitian dianggap valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Bivariate Pearson, yaitu dengan khusus memeriksa dengan membandingkan skor keseluruhan dengan skor pada setiap item. Jika r hitung > r tabel, maka kriteria pengujian terpenuhi (uji 2 sisi dengan sig. 0,05). Jika terdapat korelasi yang signifikan antara instrumen atau item pertanyaan dengan skor keseluruhan, maka pertanyaan tersebut dianggap valid (Ghozali, 2013:53).

### **Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas adalah teknik atau alat untuk menilai suatu kuesioner sebagai ukuran suatu variabel atau konstruk. Jika tanggapan responden terhadap suatu kuesioner tetap konstan atau stabil dari waktu ke waktu, maka hal tersebut dianggap reliabel atau dapar diandalkan.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara *One Shot,* yaitu hanya diukur sekali dan setelah itu hasilnya akan dibandingkan dengan jawaban terhadap pertanyaan lain. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) merupakan aplikasi yang memberikan fasilitas mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu konstruk atau variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 maka dianggap reliabel (Ghozali, 2013:47-48).

## **Metode Analisis Data**

### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan suatu data yang dapat dilihat menggunakan dengan mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan knewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik responden penelitian seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji suatu data apakah variabel residu atau pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji T dan F, mengasusikan bahwa nilai sisa atau residual mengikuti distribusi normal. Untuk ukuran sampel yang kecil, uji statistik tidak valid jika asumsi ini dilanggar. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan *Kolmogorov- Smirnov* (Ghozali, 2013:154)*.* Landasan saat mengambil keputusan, Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

1. Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi > 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

#### **Uji Multikolonieritas**

Untuk mengetahui apakah model regresi mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen digunakan uji multikolinearitas. Seharusnya tidak ada korelasi apapun antara variabel independen dalam model regresi yang benar. Jika variabel independen berkorelasi satu sama lain, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel independen yang memiliki nilai korelasi nol di antara variabel-variabel disebut sebagai variabel ortogonal.

Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Yang mana masing-masing variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya ditampilkan oleh kedua ukuran tersebut. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*Toletance*). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dinyatakan bahwa terdapat multikolinearitas pada data tersebut (Ghozali, 2013:103-104).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah variance observasi yang tersisa dalam model regresi terjadi perbedaan antara satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Disebut Homoskedastisitas apabila variance dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain sama, jika berbeda maka disebut sebagai Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas muncul dalam model regresi jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 (Ghozali, 2013:134).

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi linier berganda digunakan saat melakukan penelitian dengan beberapa variabel independen atau lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2013:94) analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih serta arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *whistleblowing system,* kompetensi akuntansi, moralitas aparatur dan dukungan manajemen puncak terhadap pencegahan *financial statement fraud* di Kecamatan Lebaksiu. Regresi yang digunakan dalam analisis linier berganda untuk menguji variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:

Keterangan:

Y = *Financial Statement Fraud*

A = Konstanta

β1- β7 = Koefisien regresi atau angka arah

X1 = *Whistleblowing System*

X2 = Kompetensi Akuntansi

X3 = Moralitas Aparatur

X4 = Dukungan Manajemen Puncak

X5 = Jenis Kelamin

X6 = Umur

X7 = Pendidikan

e = *Error* (Variabel pengganggu)

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Simultan (Uji Statistik f)**

Uji statistik f secara keseluruhan digunakan untuk menguji apakah pencegahan *Financial Satement Fraud* terhubungan secara linear terhadap *Whistleblowing System,* Kompetensi Akuntansi, Moralitas Apartur dan Dukungan Manajemet Puncak dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Jika nilai Fhitung > Ftabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%. Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, jika nilai probabilitas <0,05 (untuk signifikansi = 5%) (Ghozali, 2013:96).

#### **Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sendiri (Ghozali, 2013:97). Tingkat signifikansi 0.025 (2.5%) digunakan dalam pengujian ini, dengan kriteria uji t berikut ini:

1. Nilai signifikan < 0,025 maka dikatakan signifikan. Jika t hitung lebih besar dari t tabel senilai 1.976.
2. Nilai signifikan > 0,025 maka dikatakan tidak signifikan. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel senilai 1.976.

#### **Koefisiensi Determinasi**

Koefisien determinasi (R2) mengkuantifikasi sejauh mana perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Tanda antara nol dan satu merupakan kisaran koefisien determinasi. Nilai R2 yang rendah menunjukkan sangat terbatasnya kemampuan variabel independen dalam memperhitungkan variasi variabel dependen. Nilai perkiraan satu menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel dependen disediakan oleh variabel independen.

Salah satu kelemahan utama dalam penerapan koefisien determinasi adalah tidak memperhitungkan kuantitas variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, banyak ahli menyarankan penggunaan R2 yang disesuaikan untuk menentukan model regresi mana yang terbaik. Jika model penelitian memasukkan satu variabel independen maka nilai adjusted R2 bisa naik atau turun (Ghozali, 2013:95). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

***K*𝒅 = 𝑟2 ×100%**

Keterangan

Kd = Koefisien Determinasi

r2 = Nilai Koefisien Korelas